



PUTUSAN

Nomor: 6/P/FP/2021/PTUN.PL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan dalam Sengketa Permohonan untuk Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan sebagai berikut, yang diajukan oleh:

PT. SINAR MOROKARTA PERKASA, suatu badan hukum perdata berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kabupaten Morowali, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sinar Morokarta Perkasa, Nomor 24 tanggal 14 Januari 2008, yang dibuat di hadapan ETHA MALIPUNGI, S.H., Notaris di Kabupaten Donggala, dan telah tercatat pada Sistem Administrasi Badan Hukum pada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Daftar Perseroan Nomor AHU-0029903.AH.01.09. Tahun 2008 tanggal 23 April 2008, dalam hal ini diwakili oleh **SYARIFUDIN HAFID**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Trans Sulawesi Nomor 100 Desa Wosu, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali, Pekerjaan/Jabatan sebagai Direktur PT. Sinar Morokarta Perkasa.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 001/Triakso/I/2021 tanggal 21 Januari 2021, telah memberikan kuasa kepada:

1. TRIAKSO ADHI BAGUS CAKRA, S.H.
2. MARNO, S.H.,

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum Pada Kantor Triakso & Partners, beralamat kantor di Jalan Singgani No.1 Kelurahan Mamboro, Kota Palu;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Halaman 1 dari 43 Halaman Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2021/PTUN.PL



MELAWAN

BUPATI MOROWALI, Berkedudukan di Kompleks Perkantoran Bumi Fonuasingko, Bungku, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 047/0205/HKM/II/2021 tanggal 2 Februari 2021 telah memberikan kuasa kepada:

1. **BAHDIN BAID, S.H.,M.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Morowali, beralamat di Kompleks Perkantoran Fanuasingko, Bungku, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;
2. **HASRUN BUKIA, S.H.,M.Kn.**, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Setda Kabupaten Morowali, beralamat di Kompleks Perkantoran Fanuasingko, Bungku, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;
3. **ARIF SULAEMAN, S.H, M.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat,/Pengacara pada Kantor Pengacara ADM & Associates, beralamat di Jalan Tombolotutu Nomor 36 Palu Provinsi Sulawesi Tengah;
4. **MAHFUD MASUARA, S.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat,/Pengacara pada Kantor Pengacara ADM & Associates, beralamat di Jalan Tombolotutu Nomor 36 Palu Provinsi Sulawesi Tengah;
5. **DICKY MAULUDY BADRIANSYAH, S.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat,/Pengacara pada Kantor Pengacara ADM & Associates, beralamat di Jalan Tombolotutu Nomor 36 Palu Provinsi Sulawesi Tengah;

Halaman 2 dari 43 Halaman Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2021/PTUN.PL



6. RUDI M. TAMALANDE, S.H.,
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat,/Pengacara pada Kantor Pengacara ADM &
Associates, beralamat di Jalan Tombolotutu Nomor 36
Palu Provinsi Sulawesi Tengah;

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut telah membaca:

- 1.-----P
enetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor:
6/PEN/MH/2021/PTUN.PL, tanggal 26 Januari 2021 tentang Penunjukkan
Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;
- 2.-----S
urat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 6/PEN-
PPJS/2021/PTUN.PL tanggal 26 Januari 2021 tentang Penunjukkan
Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
- 3.-----P
enetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor:
6/PEN-HS/2021/PTUN.PL, tanggal 26 Januari 2021 tentang Penetapan Hari
Sidang Pertama;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu
Nomor: 6/P/FP/2021/PTUN.PL, tanggal 26 Januari 2021 tentang
Penetapan Jadwal Persidangan;
5. Berkas perkara dan mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa di
Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan tertanggal 21
Januari 2021 dan teregister di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara
Palu melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 25 Januari 2021 dengan
register perkara Nomor: 6/P/FP/2021/PTUN.PL., pada pokoknya
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. OBJEK PERMOHONAN

Bahwa yang menjadi Objek Permohonan dalam perkara a quo pada saat
didaftarkan adalah Keputusan Tata Usaha Negara Tentang;
Sikap diam Pejabat Tata Usaha Negara atas Surat Nomor:
037/DIR/SMP/X/2020 tentang Permohonan Penyerahan Izin Usaha
Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT. Sinar Morokarta Perkasa

Halaman 3 dari 43 Halaman Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2021/PTUN.PL



Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Melalui mekanisme Penyerahan Dokumen Perizinan Dibidang Pertambangan Mineral Dan Batubara (P3D) sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun Dokumen Perizinan yang kami maksud adalah;

Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.005/DESDM/II/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Sinar Morokarta Perkasa tanggal 16 Januari 2012 dengan Luas 468 Hektar. Yang terletak di desa Bahomotefe, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah.

Termohon **TIDAK** memberikan tanggapan atau tindakan, berkenaan dengan Permohonan Penyerahan Dokumen Perizinan milik PEMOHON. Dimana hal tersebut sudah menjadi kewajiban TERMOHON untuk menanggapi permohonan PEMOHON. Dan dengan sikap diam TERMOHON tersebut, maka TERMOHON dianggap telah mengeluarkan Keputusan atau Objek Permohonan dalam perkara a quo. Dengan demikian Objek Permohonan telah sesuai dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan.

II. KEWENAGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2020, PEMOHON telah mengajukan Surat Nomor: **037/DIR/SMP/X/2020** Perihal **Permohonan Penyerahan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT. Sinar Morokarta Perkasa Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah**, Adapun yang dimohonkan PEMOHON adalah penyerahan dokumen berupa; *Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.005/DESDM/II/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Sinar Morokarta Perkasa tanggal 16 Januari 2012 dengan Luas 468 Hektar. Yang terletak di desa Bahomotefe, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah.*

2. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5). Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan;



- (1). Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2). Jika ketentuan peraturan Perundang-Undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1), maka badan dan/atau Pejabat pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dalam waktu paling lama (10) hari kerja setelah Permohonan diterima secara lengkap oleh badan dan/atau pejabat Pemerintahan.
- (3). Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum
- (4). Pemohon mengajukan Permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh Putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (3).
- (5). Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan.

3. Bahwa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja tanggal 2 November 2020, telah menghapuskan ketentuan pasal 53 ayat (4) dan (5) Undang-undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan khususnya berkaitan dengan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara. Akan tetapi, merujuk pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang mengatur bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk Memeriksa, Mengadili dan Memutus Suatu Perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib untuk Memeriksa dan Mengadilinya.

4. Bahwa Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penanganan Pendaftaran Perkara untuk Memperoleh Putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan Badan atau Pejabat pemerintahan tanggal 8 Januari 2021, hal ini menjawab kebutuhan Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mana di sampaikan pada intinya untuk penanganan Perkara untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan berpedoman pada peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 tahun 2017 tentang Pedoman beracara untuk memperoleh putusan atas penerimaan Permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan. Surat Edaran tersebut sebagai pedoman penanganan perkara pasca

Halaman 5 dari 43 Halaman Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2021/PTUN.PL



lahirnya Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sampai dengan diterbitkannya peraturan pelaksanaan Pasal 175 angka 6 Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah mengubah Pasal 53 Ayat (5) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

5. Bahwa adapun Permohonan PEMOHON diajukan tanggal 27 Oktober 2020, diketahui bahwa Permohonan PEMOHON diajukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja tanggal 2 November 2020. Maka sudah seharusnya Pengadilan masih memiliki kewenangan Mengadili perkara aquo.

6. Bahwa dari sejak tanggal 27 Oktober 2020 dan hingga tanggal 25 November 2020, TERMOHON tidak menanggapi Permohonan PEMOHON. Maka dengan demikian batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah bersesuaian.

7. Bahwa karena Permohonan PEMOHON tidak ditanggapi, PEMOHON kemudian pada tanggal 26 November 2020 mengajukan keberatan secara tertulis sebagaimana Surat Nomor: 041/DIR/SMP/XII/2020. Dan berdasarkan Pasal 77 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, *menyebutkan "Ayat 4. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja. dan Ayat (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan"*.

8. Bahwa hingga diajukannya Permohonan ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, TERMOHON tidak juga menanggapi Permohonan PEMOHON dan Keberatan yang diajukan oleh PEMOHON.

9. Bahwa sebagaimana alasan diatas, Permohonan yang tidak ditindak lanjuti oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dengan Keputusan dan/atau tindakan, maka dianggap dikabulkan secara hukum, oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berwenang memeriksa dan memutus Permohonan ini.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN.

1. Bahwa sebelumnya, PEMOHON mengetahui jika dokumen Izin Usaha Pertambangan milik PEMOHON tidak diserahkan oleh TERMOHON pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Melalui penyampaian lisan dan sekaligus melihat dokumen daftar Izin Usaha Pertambangan yang diserahkan melalui mekanisme Penyerahan Dokumen Perizinan dibidang Pertambangan Mineral dan Batubara (P3D) yang ada pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 27 Oktober 2020.

Halaman 6 dari 43 Halaman Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2021/PTUN.PL



2. Bahwa Karena baru diketahui dan dilihat oleh PEMOHON tanggal 27 Oktober 2020 bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik PEMOHON tidak terdaftar. akibat tidak diserahkan oleh TERMOHON kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Maka PEMOHON mengajukan Permohonan agar menyerahkan dokumen aquo pada tanggal 27 Oktober 2020 dan setelah 10 (sepuluh) hari kerja Permohonan tidak ditanggapi oleh TERMOHO, PEMOHON kembali mengajukan Keberatan tanggal 26 November 2020.

3. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana diatas. Maka, Permohonan ini masih dalam tenggang waktu untuk diajukan sebagaimana ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

IV. KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN PEMOHON

1. Bahwa yang dapat mengajukan Permohonan untuk memperoleh putusan dalam perkara aquo adalah orang perseorangan, badan hukum perdata, atau badan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman beracara untuk memperoleh putusan atas penerimaan Permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

2. Bahwa PEMOHON adalah Suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jl. Trans Sulawesi Nomor 100 Desa Wosu. Perseroan Terbatas ini, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sinar Morokarta Perkasa, Nomor 24.- Tanggal 14 Januari 2008 yang dibuat dihadapan **ETHA MALIMPUNGI, S.H.**, Notaris di Donggala

3. Bahwa PEMOHON adalah pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang sah secara hukum, sebagaimana Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.005/DESDM/II/2012 tentang Persetujuan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi Kepada PT. Sinar Morokarta Perkasa tanggal 16 Januari 2012 dengan Luas 468 Hektar. Yang terletak di desa Bahomotefe, Kec. Bungku Tengah, Kab. Morowali, Prov. Sulawesi Tengah.

4. Bahwa PEMOHON merasa sangat dirugikan atas tindakan TERMOHON karena tidak menyerahkan dokumen milik PEMOHON pada saat Penyerahan Dokumen Perizinan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (P3D), sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

5. Bahwa karena dokumen milik PEMOHON tidak diserahkan oleh TERMOHON pada saat mekanisme (P3D). Maka pada tanggal 27 Oktober 2020 PEMOHON mengirimkan surat Permohonan, yang

Halaman 7 dari 43 Halaman Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2021/PTUN.PL



intinya meminta agar Dokumen Izin Usaha Pertambangan milik PEMOHON diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Dan karena surat Permohonan Aquo tidak juga mendapat tanggapan dari TERMOHON, maka PEMOHON kembali melayangkan surat keberatan tanggal 26 November 2020. Akan tetapi hingga Permohonan ini diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, TERMOHON juga belum menyerahkan dan bahkan tidak merespon permohonan dan keberatan PEMOHON.

6. Bahwa karena upaya administrasi sebagaimana Permohonan dan Keberatan PEMOHON kepada TERMOHON, dan TERMOHON tidak menindaklanjuti Permohonan PEMOHON yang merupakan tanggungjawab TERMOHON. Maka TERMOHON yang tidak menetapkan dan/atau tidak melakukan tindakan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah Permohonan diterima, maka Permohonan PT. Sinar Morokarta Perkasa dianggap di-KABULKAN secara hukum.

7. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka PEMOHON sah dan memiliki kedudukan hukum sebagai Perseroan Terbatas yang dirugikan atas tindakan TERMOHON, dan untuk itu, PEMOHON sangat berkepentingan dalam perkara aquo.

V. DASAR DAN ALASAN DIAJUKANNYA PERMOHONAN.

Adapun dasar serta berikut uraian sehingga diajukannya Permohonan ini, adalah sebagai berikut;

1. PEMOHON adalah Suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jl. Trans Sulawesi Nomor 100 Desa Wosu. Perseroan Terbatas ini, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sinar Morokarta Perkasa, Nomor 24.- Tanggal 14 Januari 2008 yang dibuat dihadapan **ETHA MALIMPUNGI, S.H.**, Notaris di Donggala dan telah mendapat pengesahan Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0029903.AH.01.09. Tahun 2008 tanggal 23 April 2008.
2. Bahwa PEMOHON memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebagaimana Surat Keputusan Nomor: 540.3/SK.005/DESDM//2012 tentang Persetujuan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi produksi Kepada PT. Sinar Morokarta Perkasa tanggal 16 Januari 2012 dengan Luas 468 Hektar. Yang terletak di desa Bahomotefe, Kec. Bungku Tengah, Kab. Morowali, Prov. Sulawesi Tengah;
3. Bahwa sebagaimana uraian diatas, PEMOHON melakukan koordinasi pada dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai Izin Usaha Pertambangan PEMOHON, akan tetapi berdasarkan daftar yang diperlihatkan kepada PEMOHON tanggal 27 Oktober 2020 bahwa tidak terdapat Izin Usaha Pertambangan PT. SINAR MOROKARTA PERKASA dalam berita acara serah terima dokumen. Maka pada saat itu juga PEMOHON memerintahkan staf di Jakarta agar mengajukan surat Permohonan kepada TERMOHON dan melalui staf lapangan di Morowali diantarkan

Halaman 8 dari 43 Halaman Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2021/PTUN.PL



kepada TERMOHON pada bagian umum kantor TERMOHON. Tujuannya, Agar TERMOHON berkenan menyerahkan dokumen milik PEMOHON kepada Gubernur Sulawesi Tengah.

4. Bahwa Serah terima Dokumen (P3D) merujuk pada Pada Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Menyebutkan ***“Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen sebagai akibat pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang diatur berdasarkan undang-undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini di Undangkan.***

5. Bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Peraturan menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, disebutkan ***“Bupati/Walikota wajib menyampaikan dokumen perizinan dibidang menaral dan Batubara dalam rangka penenaman modal dalam negeri dan WIUP-nya dalam 1 (satu) wilayah provinsi beserta kelengkapannya kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah.*** Hal tersebut tidak dilakukan oleh TERMOHON, sehingga dengan demikian TERMOHON telah melanggar hukum dan mengabaikan hak-hak PEMOHON.

6. Bahwa pada saat dilakukan Penyerahan Dokumen oleh pemerintah Kabupaten Morowali, setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan menteri ESDM Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, **TERMOHON tidak mengikut sertakan dokumen milik PEMOHON kedalam mekanisme P3D kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal ini Gubernur Sulawesi Tengah untuk dibuatkan berita acara serah terima dokumen, sehingga sangat jelas dan terang TERMOHON telah melanggar ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.**

7. Bahwa akibat tidak diteruskannya dokumen PEMOHON, tindakan tersebut merupakan perbuatan dan atau kelalaian TERMOHON, dan PEMOHON mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 4.000.000.000 (Empats Milyar Rupiah).

8. Bahwa meskipun tindakan TERMOHON yang tidak menyerahkan dokumen PEMOHON yang berdampak kerugian kepada PEMOHON, akan tetapi PEMOHON tetap berusaha menempuh langkah-langkah konstitusional dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan cara mengirimkan surat Permohonan kepada TERMOHON agar melimpahkan dokumen milik PEMOHON kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

9. Bahwa hingga saat ini, PEMOHON hendak melakukan aktivitas operasi produksi dilokasi, akan tetapi tidak bisa terlaksana karena dokumen IUP milik PEMOHON tidak terdaftar



akibat tidak dilimpahkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

10. Bahwa yang perlu kami tegaskan, di Lokasi atau wilayah pertambangan sebagaimana Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang kami miliki, tidak terdapat Izin Usaha Pertambangan milik orang lain atau badan hukum lainnya, sehingga lokasi dan dokumen milik PEMOHON sangat Clear and Clean.

11. Bahwa kini, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara telah berlaku, dimana kewenangan mengenai Pertambangan Mineral telah beralih menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Bahwa meski UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan UU 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara telah berlaku, akan tetapi peraturan Teknis pelaksanaan UU tersebut belum ada, sehingga seluruh kewenangan terkait dengan dokumen perizinan Pertambangan masih menjadi urusan pemerintah Provinsi selama belum terdapat peraturan teknis, termasuk teknis penyerahan dokumen oleh Pemerintah Provinsi kepada pemerintah Pusat.

Bahwa dengan demikian, Pemerintah Provinsi dalam hal ini Gubernur masih memiliki kewenangan menerima dokumen PEMOHON yang diserahkan oleh TERMOHON).

12. Bahwa Selanjutnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, alasan yang dapat digunakan oleh PEMOHON apabila Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat/dimohon telah nyata bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau telah bertentangan dengan asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB).

13. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur perihal kewajiban Pejabat Pemerintahan berdasarkan pada peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) dalam menggunakan wewenangnya dan juga dalam setiap mengambil keputusan dan/atau tindakan.

14. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) butir a dan b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan; **Pejabat Pemerintahan memiliki Kewajiban; a). Membuat Keputusan dan/atau tindakan sesuai kewenangannya; b). Mematuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.**

15. Bahwa berdasarkan uraian dalam Permohonan ini, PEMOHON mengalami pengabaian hak oleh TERMOHON, dimana TERMOHON tidak menetapkan dan/atau tidak melakukan tindakan setelah melewati waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diajukannya Permohonan oleh PEMOHON. Dan 10 hari kerja

Halaman 10 dari 43 Halaman Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2021/PTUN.PL



setelah pernyataan Keberatan, Sehingga TERMOHON patut dinyatakan telah melakukan pelanggaran terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), sebagai berikut;

TERMOHON melanggar Asas Kecermatan

Asas ini menghendaki agar Pemerintah bertindak cermat, bahkan mengharuskannya berhati-hati, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat.

Bahwa berdasarkan uraian Permohonan PEMOHON, TERMOHON telah bertindak tidak cermat dan tidak berhati-hati, sehingga dengan tidak diserahkannya dokumen milik PEMOHON oleh TERMOHON kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada saat dilakukan serah terima dokumen tahun 2016 mengakibatkan timbulnya kerugian bagi PEMOHON.

Dan Bahwa dengan tidak diakomodirnya atau tidak ditindak lanjutinya Permohonan PEMOHON tanggal 27 Oktober 2020 dan Keberatan PEMOHON tanggal 26 November 2020, merupakan tindakan yang melanggar asas Kecermatan.

TERMOHON melanggar Asas Keterbukaan

Asas ini jelas menyatakan bahwa Pejabat Tata Usaha Negara berkewajiban melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi atau golongan.

Bahwa dengan tidak dilimpahkannya dokumen milik PEMOHON kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah oleh TERMOHON, pada tahun 2016, TERMOHON telah tidak jujur dan diskriminatif dalam memperlakukan setiap Investasi yang beraktifitas diwilayahnya.

Dan Bahwa dengan tidak diakomodirnya atau tidak ditindak lanjutinya Permohonan PEMOHON tanggal 27 Oktober 2020 dan Keberatan PEMOHON tanggal 26 November 2020, merupakan tindakan yang melanggar asas Keterbukaan.

TERMOHON melanggar Asas Kepastian Hukum

Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

Bahwa serah terima dokumen Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 540/08/DISESDM/2016 tanggal 12 April 2016. Yang tidak mengikut sertakan dokumen milik PEMOHON, TERMOHON telah melanggar ketentuan peraturan Perundang-undangan khususnya Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Yang mewajibkan kepada TERMOHON untuk menyerahkan dokumen PEMOHON kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dengan demikian Asas ini telah dilanggar oleh TERMOHON.

Dan Bahwa dengan tidak diakomodirnya atau tidak ditindak lanjutinya Permohonan PEMOHON tanggal 27 Oktober 2020 dan Keberatan

Halaman 11 dari 43 Halaman Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2021/PTUN.PL



PEMOHON tanggal 26 November 2020, merupakan tindakan yang melanggar asas Kepastian Hukum.

TERMOHON Melanggar Asas Penyalagunaan Wewenang.

Adalah Asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukan kewenangan.

Bahwa serah terima dokumen Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 540/08/DISESDM/2016 tanggal 12 April 2016. Yang mana dokumen PEMOHON tidak di ikutsertakan, maka tindakan tersebut adalah tindakan menyalahgunakan kewenangan.

Dan Bahwa dengan tidak diakomodirnya atau tidak ditindak lanjutinya Permohonan PEMOHON tanggal 27 Oktober 2020 dan Keberatan PEMOHON tanggal 26 November 2020, merupakan tindakan yang melanggar asas Penyalagunaan Kewenangan.

TERMOHON Melanggar Asas Ketidakberpihakan

Asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak Diskrimintaif.

Bahwa serah terima dokumen Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 540/08/DISESDM/2016 tanggal 12 April 2016. Yang mana dokumen PEMOHON tidak di ikutsertakan, maka tindakan tersebut adalah tindakan yang Diskrimintaif.

Dan Bahwa dengan tidak diakomodirnya atau tidak ditindak lanjutinya Permohonan PEMOHON tanggal 27 Oktober 2020 dan Keberatan PEMOHON tanggal 26 November 2020, merupakan tindakan yang melanggar asas Ketidakberpihakan.

VI. PETIUM

Berdasarkan seluruh uraian, fakta dan dalil-dalil PEMOHON tersebut diatas, PEMOHON memohon agar yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus permohonan aquo berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON.
2. Mawajibkan kepada TERMOHON (Bupati Morowali) untuk menyerahkan Surat Keputusan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Gubernur Sulawesi Tengah) dalam bentuk Berita Acara Penyerahan Dokumen Perizinan Dibidang Pertambangan Mineral dan Batubara, berupa;

Halaman 12 dari 43 Halaman Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.005/DESDM/II/2012 tentang Persetujuan Peningkatan IUP Eksplorasi Menjadi IUP Operasi Produksi Kepada PT. Sinar Morokarta Perkasa tanggal 16 Januari 2012 dengan Luas 468 Hektar. Yang terletak didesa Bahomotefe, Kec. Bungku Tengah, Kab. Morowali, Prov. Sulawesi Tengah. Beserta dokumen pendukung Lainnya;

3. Menghukum TERMOHON untuk membayar biaya perkara.

Dan atau apabila Majelis Hakim Pemeriksa perkara *aquo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan Tanggapan secara tertulis pada Persidangan tanggal 8 Februari 2021, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

MENGENAI OBJEK PERMOHONAN

1. Bahwa dalam dalil permohonan pemohon yang menjadi objek dalam perkara *a quo* adalah keputusan tata negara tentang sikap diam Pejabat Tata Usaha Negara atas surat No.037/DIR/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 tentang pennohonan penyerahan izin pertambangan (IUP) eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT.SINAR MOROKARTA PERKASA yang ada pada pemerintah pada Kabupaten Morowali kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, melalui mekanisme perizinan penyerahan dokumen perizinan dibidang pertambangan mineral dan batubara (P3D) dengan dokumen perizinan yang dimaksud adalah Nomor.540.31SK.005/DESDM/U2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT.SINAR MOROKARTA PERKASA tanggal 16 januari 2012 dengan luas 468 Hektar. Yang terletak didesa Bahomotefe, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah.

2. Bahwa Termohon Menolak dengan Tegas Dalil Permohonan Pemohon terkait dengan surat No.037/DIRiX/2020 tangga127 Oktober 2020 tentang permohonan penyerahan izin pertambangan (IUP) Eksplorasi PT.SINAR MOROKARTA PERKASA. Berdasarkan Surat keputusan Nomor. 540.3/SK.OOS/DESDM/II2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT.SINAR MOROKARTA PERKASA tanggal 16 januari 2012 dengan luas 468 Hektar. Yang terletak didesa Bahomotefe, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah sebab izin Usaha Pertambangan milik Pemohon tersebut telah dicabut sehingga Termohon tidak lagi menyerahkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dengan mekanisme Penyerahan Dokumen Perizinan dibidang Pertambangan

Halaman 13 dari 43 Halaman Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mineral dan Batubar (P3D) yang ada pada Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah ;

3. Bahwa termohon tidak memberikan tanggapan atau tindakan berkenaan dengan permohonan penyerahan dokumen perizinan milik pemohon. karena termohon berketetapan bahwa Surat keputusan bupati morowali Nomor. 540.3/SK.OOSIDESDM//2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT.SINAR MOROKARTA PERKASA tanggal 16 januari 2012 dengan luas 468 Hektar. Yang terletak didesa Bahomotefe, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Moworali, Provinsi Sulawesi Tengah, telah dicabut dengan mengeluarkan keputusan Bupati morowali Tentang PENCABUTAN MIN USAHA PERTAMBANGAN EKSLORASI PT. SINAR MOROKARTA PERKASA;

4. Bahwa karena termohon tidak memberikan tanggapan atau tindakan atas permohonan Pemohon seharusnya Pemohon menganggapnya sebagai suatu Penolakan sebagaimana pasal Pasal 3 ayat (1), (2), dan (3) undang - undang nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan-atas undang-undang nomor 5 tahun -1986 tentang peradilan Tata Usaha-Negara menyatakan bahwa:

1. Apabila badan atau pejabat tata Usaha Negara tidak mengeluarkan Keputusan, sedangkan hal itu, menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara.
2. Jika suatu badan atau pejabat tata Usaha Negara tidak mengeluarkan Keputusan. yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan Perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata usaha Negara tersebut di anggap telah menolak mengeluarkan Keputusan yang dimaksud.
3. Dalam hal peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan tidak menehikan jangka waktu sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan Penolakan.

MENGENAI KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa Permohonan Pemohon terhadap Termohon terkait dengan Penyerahan Dokumen Keputusan Bupati Nomor.540.3/SK.005/DESDM/U2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT.SINAR MOROKARTA PERKASA tanggal 16 januari 2012 dengan luas 468 Hektar adalah tidak beralasan karena Termohon telah mengeluarkan keputusan Bupati morowali Tentang PENCABUTAN MIN USAHA PERTAMBANGAN PT.SINAR MOROKARTA PERKASA, dan hal tersebut telah diketahui oleh

Halaman 14 dari 43 Halaman Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon (akan dibuktikan dalam Agenda Pembuktian), karena termohon telah mengeluarkan surat keputusan tentang pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) tersebut. Oleh karena itu, Termohon tidak memberikan tanggapan atau tindakan atas permohonan Pemohon tersebut karena Termohon menganggapnya sebagai suatu Penolakan.

2. Bahwa Pemohon Keliru dalam menilai Tindakan Termohon dengan memaknai bahwa Apabila Permohonan Pemohon tidak di tanggapi maka Permohonan di anggap diterima. Padahal sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (1), (2), dan (3) undang - undang nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa:

1. Apabila badan atau pejabat tata Usaha Negara tidak mengeluarkan Keputusan, sedangkan hal itu, menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara.
2. Jika suatu badan atau pejabat tata Usaha Negara tidak mengeluarkan Keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan Perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata usaha Negara tersebut di anggap telah menolak mengeluarkan Keputusan yang dimaksud.
3. Dalam hal peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan Penolakan.

3. Bahwa karena termohon telah mencabut objek perkara yang dimaksud oleh pemohon dalam perkara a quo maka pengadilan tata usaha negara tidak berwenang untuk megadili perkara a quo. Selain itu, sebagaimana yang di maksud dalam undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang admistrasi pemerintahan.

Pasal 52 Ayat (1) menyatakan "Syarat sahnya keputusan meliputi :

- a. Ditetapkan pejabat yang berwenang
- b. Dibuat sesuai prosedur
- c. Substansi sesuai dengan objek keputusan keputusan

Pasal 52 Ayat (2)

- a. Sahnya keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum yang baik.

Halaman 15 dari 43 Halaman Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2021/PTUN.PL



Sedangkan dalam pasal 53 ayat (2) undang - undang nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara menyebutkan bahwa alasan alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan undang-undang berlaku.
- b. Keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan asas - asas umum yang baik.

Sehubungan dengan hat tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa Objek Keputusan Bupati Nomor.540.3/SK.005/17ESDMIII2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT.SINAR MOROKARTA PERKASA tanggal 16 januari 2012 dengan luas 468 Hektar. Yang terletak didesa Bahomotefe, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah yang di dalilkan oleh Pemohon dalam perkara a quo, telah dicabut oleh pihak Termohon, maka sangat tidak dimungkinkan untuk diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;

Selain itu, tentunya Objek Perkara yang didalilkan oleh Pemohon dalam perkara aquo bukanlah Keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan undang-undang berlaku:- Serta bukan Keputusan tata usaha negara-yang digugat itu bertentangan-dengan asas - asas umum yang baik.

Sehingga, dalam menguji keabsahan menurut hukum terhadap objek sengketa dari segi kewenangan, prosedur dan substansi untuk mengetahui apakah telah sesuai atau telah bertentangan dengan peraturan undang-undang yang berlaku dan asas pemerintahan yang baik. Tidak dapat dijadikan Dasar dalam menguji perkara aquo.

MENGENAI TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa benar Termohon tidak menyerahkan Dokumen Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (P3D) Kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 27 Oktober 2020. karena Termohon telah mengeluarkan Keputusan Bupati morowali Tentang PENCABUTAN IZIN USAHA Pertambangan Pemohon dan hal tersebut telah diketahui oleh Pemohon (Akan dibuktikan dalam Agenda Pembuktian);

MENGENAI KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN PEMOHON

1. Bahwa Pemohon dalam mengajukan Permohonan tidak memiliki kedudukan Hukum sebab surat keputusan Bupati Morowali Nomor.540.3/SK.005/DESDM/U2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. SINAR MOROKARTA PERKASA tanggal

Halaman 16 dari 43 Halaman Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2021/PTUN.PL



16 januari 2012 dengan luas 468 Hektar. Yang terletak didesa Bahomotefe, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, telah dicabut dan Pemohon mengetahui dengan pasti bahwa Termohon telah mengeluarkan keputusan Bupati morowali Tentang PENCABUTAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLOKORASI PT. SINAR MOROKARTA PERKASA yang isinya mencabut Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor.540.3/SK.005/DESDMJI/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT.SINAR MOROKARTA PERKASA tanggal 16 januari 2012 dengan luas 468 Hektar. Yang terletak didesa Bahomotefe, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;

2. Bahwa Kerugian yang di rasa oleh pemohon adalah tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan karena alasan Termohon tidak menyerahkan Dokumen milik Pemohon pada saat penyerahan Dokumen Perizinan Dibidang Pertambangan Mineral dan Batubara (P3D) sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah karena Termohon telah mengeluarkan keputusan Bupati morowali Tentang PENCABUTAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLOKORASI PT. SINAR MOROKARTA PERKASA yang isinya mencabut Surat

Keputusan Bupati Morowali Nomor.540.3/SK.005/DESDMII/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT.SINAR MOROKARTA PERKASA tanggal 16 januari 2012 dengan luas 468 Hektar. Yang terletak didesa Bahomotefe, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;

3. Bahwa terkait dengan Dalil Permohonan Pemohon Pada Angka 5, dan 6, Pada Halaman 6 Bahwa perlu Termohon Tegaskan kembali bahwa Pemohon Keliru dalam menilai Tindakan Termohon dengan memaknai bahwa Apabila Permohonan Pemohon tidak di tanggapi maka Permohonan di anggap diterima. Padahal sebagaimana dalam pasal Pasal 3 ayat (1), (2), dan (3) undang - undang nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa:

1. Apabila badan atau Pejabat tata Usaha Negara tidak mengeluarkan Keputusan, sedangkan hal itu, menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara.
2. Jika suatu badan atau Pejabat tata Usaha Negara tidak mengeluarkan Keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan Perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata usaha Negara tersebut di anggap telah menolak mengeluarkan Keputusan yang dimaksud.
3. Dalam hal peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya

Halaman 17 dari 43 Halaman Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2021/PTUN.PL



permohonan, badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan Penolakan.

4. Bahwa berdasarkan Hal tersebut Patut dinyatakan bahwa Pemohon Tidak Memiliki Kedudukan Hukum dalam mengajukan Permohonan di Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga Patut dinyatakan Di tolak.

DASAR DAN ALASAN DIAJUKANNYA PERMOHONAN

1. Bahwa Tidak Benar jika pemohon telah memegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang sah secara hukum karena Termohon pernah mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor.540.3/SK.OOSIDESDM//2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT.SINAR MOROKARTA PERKASA tanggal 1.6 januari 2012 dengan luas 468 Hektar. Yang terletak didesa Bahomotefe, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, telah dicabut dan Pemohon mengetahui dengan pasti bahwa Termohon telah mengeluarkan keputusan Bupati morowali Tentang PENCABUTAN WIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORESI PT.SINAR MOROKARTA PERKASA yang isinya mencabut Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor.540.3/SK005/DESDM//2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT.SINAR MOROKARTA PERKASA tanggal 16 januari 2012 dengan luas 468 Hektar. Yang terletak didesa Bahomotefe, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah.

2. Bahwa Benar tidak terdapat Izin Usaha Pertambangan PT. SINAR MOROKARTA PERKASA dalam berita Acara Serah Terima Dokumen yang diserahkan oleh Termohon Kepada Pemerintahan Provinsi sebab Termohon Telah mencabut Izin Pertambangan milik Pemohon dengan alasan hukum Pemohon telah melanggar Ketentuan administrasi, tehnik dan keuangan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;

3. Bahwa terkait dengan dalil permohonan pemohon pada angka 4, angka (5), dan angka (6) halaman 8. Terkait dengan serah terima dokument (P3D) yang merujuk pada pasal 404 undang undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah tidak dapat dijadikan sebagai acuan ataupun rujukan karena sebelum undang undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah disahkan pada tanggal 30 September 2014 izin usaha pertambangan (IUP) PT.SINAR MOROKARTA PERKASA telah dicabut lebih dulu pada melalui keputusan Bupati morowali Tentang PENCABUTAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORESI PT.SINAR MOROKARTA PERKASA yang akan Termohon buktikan pada tahap pembuktian;

4. Bahwa terkait dengan dalil permohonan pemohon pada angka 7 halaman 8 tidak dapat dibenarkan sebab bagaimana mungkin pemohon

Halaman 18 dari 43 Halaman Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2021/PTUN.PL



mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 4.000.000.000,- (Empat Milyar rupiah) akibat perbuatan dan atau kelalaian Termohon adalah dalil yang mengada-ada dan sangat tendensius, kami menyerahkan kepada Majelis Hakim Yang Mulia;

5. Bahwa terkait dalil permohonan pemohon dalam angka 8,9 dan 10 pada halaman 8 dan 9 memang pada dasarnya tidak dapat dilaksanakan sebab izin usaha pertambangan OUP) telah dicabut;

6. Bahwa termohon menolak dengan tegas terkait dengan dalil permohonan pemohon pada angka 12 dan 15 halaman 9 dan 10 karena tindakan termohon tidaklah bertentangan dengan peraturan undang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Mengenai asas kecermatan

Bahwa termohon dalam melakukan tindakan hukum telah bertindak cermat dan berhati-hati dalam mengeluarkan Surat Keputusan Pencabutan IUP yang diberikan Kepada Termohon dengan mempertimbangkan dari sisi adminitrasi, tehnik dan keuangan sebagaimana yang ditentukan peraturan penuidang-undangan;

Mengenai asas keterbukaan

Bahwa jelas termohon selaku pejabat tata usaha negara telah melakukan kewajibanya dengan memberikan informasi jujur, dan tidak diskriminatif dalam menjalankan sistem pemerintahan, karena Termohon telah membuka semua akses dalam hal pengelolaan tambang yang berada di Kabupaten Morowali;

Mengenai asas kepastian hukum

Bahwa dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang- undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara pemerintahan, dimana Termohon telah mengeluarkan Surat Keputusan Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan milik Pemohon adalah suatu bentuk memberikan kepastian Hukum;

Mengenai Asas Penyalahgunaan Wewenang

Adalah Asas yang mewajibkan setiap dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampur adukan kewenangan, dalam hal ini Termohon tidak pernah sekalipun menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya untuk kepentingan pribadi ataupun golongan yang melanggar aturan peraturan perundang-undangan;

Melanggar Asas Ketidakberpihakan

Halaman 19 dari 43 Halaman Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara dan tidak Diskriminatif, dimana Termohon tidak membedakan antara pemegang IUP satu dengan pemegang IUP lainnya, ketika melanggar aturan maka pemegang IUP itu akan dicabut, terbukti dengan banyaknya IUP yang telah termohon cabut selain pemohon.

Berdasarkan uraian jawaban tersebut diatas maka termohon memohon kiranya Ketua/Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutus sebagai amar sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Pemohon agar Termohon menyerahkan keputusan Tata Usaha Negara berupa keputusan Bupati Morowali Nomor.540.31SK.005/DESDM//2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT.SINAR MOROKARTA PERKASA tanggal 16 jannari 2012 dengan luas 468 Hektar. Yang terletak didesa Bahomotefe, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, beserta lampirannya tidak dapat dikabulkan karena telah dicabut
3. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat-lain; mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, serta selanjutnya telah diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-15 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Surat Direktur PT. Sinar Morokarata Perkasa Nomor: 037/DIR/SMP/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020, Perihal: Permohonan Penyerahan IUP oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (fotokopi sesuai asli);
2. Bukti P-2 : Surat Tanda Terima tertanggal 28 Oktober 2020 (fotokopi sesuai asli);
3. Bukti P-3 : Surat Direktur PT. Sinar Morokarata Perkasa Nomor: 041/DIR/SMP/XI/2020 tanggal 26 November 2020, Perihal: Keberatan atas tidak ditanggapinya Permohonan Penyerahan IUP oleh Pemerintah Daerah Kabupaten

Halaman 20 dari 43 Halaman Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Morowali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (fotokopi sesuai asli);
4. Bukti P-4 : Surat Tanda Terima tertanggal 27 November 2020 (fotokopi sesuai asli);
 5. Bukti P-5 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.017/DESDM/II/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Sinar Morokarta Perkasa, tanggal 23 Februari 2010 (fotokopi dari fotokopi);
 6. Bukti P-6 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.005/DESDM/II/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Sinar Morokarta Perkasa, tanggal 16 Januari 2012 (fotokopi sesuai asli);
 7. Bukti P-7 : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sinar Morokarta Perkasa tanggal 14 Januari 2008 Nomor 24, yang dibuat dihadapan Etha Malipungi, S.H., Notaris di Kabupaten Donggala (fotokopi dari fotokopi);
 8. Bukti P-8 : Kartu Tanda Penduduk atas nama SYARIFUDIN (fotokopi dari fotokopi);
 9. Bukti P-9 : NPWP PT. Sinar Morokarta Perkasa Tahun 2008 (fotokopi dari fotokopi);
 10. Bukti P-10 : Surat Keterangan Fiskal Nomor: S-430/WPJ.16/KP.0907/2010 tanggal 19 April 2010 (fotokopi dari fotokopi);
 11. Bukti P-11 : Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Morowali Nomor: 660.1/317/KLH/V/2010 tentang Kerangka Acuan (KA.ANDAL) Rencana Kegiatan Pertambangan Bijih Nikel Di Desa Bahomotefe Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah Oleh PT. Sinar Morokarta Perkasa tanggal 17 Mei 2010 (fotokopi sesuai asli);
 12. Bukti P-12 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 660.1/360/KLH/VIII/2010 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Penambangan Bijih Nikel Di Desa Bahomotefe Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah Oleh PT. Sinar Morokarta Perkasa tanggal 18 Agustus 2010 (fotokopi sesuai asli);

Halaman 21 dari 43 Halaman Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti P-13 : Lembar Persetujuan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Morowali Nomor: 660.1/359/KLH/VIII/2010 tanggal 18 Agustus 2010 (fotokopi sesuai asli);
14. Bukti P-14 : Lembar Persetujuan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Morowali Nomor: 540/177.2/DESDM/II/2011 tanggal 14 Januari 2011 (fotokopi sesuai asli);
15. Bukti P-15 : Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penanganan Pendaftaran Perkara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, tanggal 8 Januari 2021 (fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, serta selanjutnya telah diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-6 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Berita Acara Nomor: 540/08/DISESDM/2016 tentang Penyerahan Dokumen Perizinan Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 12 April 2016 (fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti T-2 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.017/DESDM/III/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Sinar Morokarta Perkasa, tanggal 23 Februari 2010 (fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti T-3 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.005/DESDM/II/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Sinar Morokarta Perkasa, tanggal 16 Januari 2012 (fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti T-4 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540/SK-PW.007/DESDM/VIII/2008 tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Untuk Lokasi Kuasa Pertambangan

Halaman 22 dari 43 Halaman Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Sinar Morokarta Perkasa, tanggal 26 Agustus 2008
(fotokopi dari fotokopi);

5. Bukti T-5 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540/SK-PW.008/DISTAMBEN/VI/2008 tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Untuk Lokasi Kuasa Pertambangan PT. Sinar Morokarta Perkasa tanggal 26 Juni 2008 (fotokopi sesuai asli);
6. Bukti T-6 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 541/SK.014/DESDM/III/2014 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Sinar Morokarta Perkasa, tanggal 10 Maret 2014 (fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa Pemohon maupun Termohon tidak mengajukan saksi maupun ahli walupun telah diberi kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan belum termuat dalam Putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk pada Berita Acara Persidangan dalam perkara yang bersangkutan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi hal-hal yang diajukan oleh Para Pihak kepada Majelis Hakim, maka selanjutnya Para Pihak mohon untuk diberi Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana tercantum dalam Permohonan tertanggal 21 Januari 2021 yang terdaftar dalam register perkara nomor: 6/P/FP/2021/PTUN.PL tanggal 25 Januari 2021, yang selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam duduk Permohonan diatas;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi Objek Permohonan dalam perkara *a quo* adalah:

“Sikap diam Pejabat Pemerintahan atas Surat Nomor: 037/DIR/SMP/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020, Perihal: Permohonan Penyerahan IUP oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, melalui Mekanisme Penyerahan Dokumen Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagaimana Amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah”, selanjutnya disebut sebagai Objek Permohonan (vide bukti P-1);

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan Tanggapan secara tertulis pada persidangan yang berlangsung tanggal 8 Februari 2021;

Halaman 23 dari 43 Halaman Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah mencermati Tanggapan Termohon maka terdapat beberapa isu hukum yang bersifat ekseptif walaupun tidak secara tegas dikualifikasikan sebagai eksepsi oleh Termohon, dan terhadap isu hukum yang bersifat ekseptif tersebut akan dipertimbangkan bersama dengan isu-isu hukum dalam aspek formal permohonan;

Menimbang, bahwa dalam hal pertimbangan pada aspek formal, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan telah memenuhi aspek formal permohonan maka isu-isu hukum yang bersifat ekseptif sebagaimana diuraikan dalam Tanggapan Termohon, dengan sendirinya secara yuridis dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa sistematika pembahasan dalam pertimbangan hukum berkaitan dengan Permohonan *a quo* adalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan mengenai kewenangan Pengadilan;
2. Pertimbangan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
3. Pertimbangan mengenai pokok Permohonan; dan
4. Kesimpulan;

Menimbang, bahwa terhadap keempat hal tersebut di atas, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Mengenai Kewenangan Pengadilan

Menimbang, bahwa secara konseptual, kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) kategori, yaitu: kewenangan absolut dan kewenangan relatif;

Menimbang, bahwa terhadap kedua hal tersebut di atas, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014), mengatur sebagai berikut:

(1)Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama



10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

(3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan (selanjutnya disebut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017), berbunyi sebagai berikut:

“Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Pengadilan dalam hal permohonan dianggap dikabulkan secara hukum yang disebabkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan Keputusan dan/atau melakukan Tindakan”.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017, berbunyi sebagai berikut:

“Objek Permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau pejabat Pemerintahan adalah kewajiban badan/atau pejabat pemerintahan untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan administrasi pemerintahan yang dimohonkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Menimbang, bahwa dengan menggunakan penafsiran sistematis terhadap ketentuan Pasal 53 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 juncto Pasal 1 Angka 1 dan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017, maka sikap pejabat pemerintahan yang memiliki kewajiban untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan administrasi pemerintahan, namun pejabat pemerintahan tersebut tidak menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dimohonkan oleh warga masyarakat, sehingga secara yuridis harus dipandang telah melakukan sikap diam atau mendiamkan suatu Permohonan;

Menimbang, bahwa apakah BUPATI MOROWALI, selaku Termohon dalam perkara *a quo*, telah melakukan sikap diam atau mendiamkan Permohonan yang diajukan PT. SINAR MOROKARTA PERKASA? Akan dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa dalam menjawab isu hukum tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu mencermati surat Permohonan (*vide* Bukti P-1) dan alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak, yaitu Bukti P-2, Bukti P-6, dan Bukti T-3, maka terdapat fakta hukum yang menunjukkan bahwa PT. SINAR MOROKARTA PERKASA melalui Direkturnya telah mengajukan Surat Nomor: 037/DIR/SMP/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020, yang mana surat tersebut diterima oleh pegawai dari instansi Termohon atas nama Fathiah Usman pada tanggal 28 Oktober 2020, dan pada pokoknya berisi Permohonan penyerahan dokumen perizinan pertambangan milik PT. SINAR MOROKARTA PERKASA yang berlokasi di Desa Bahamotefe, Kecamatan Bungku Tengah, yang ada pada Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya, Pemohon mendalilkan dalam Surat Permohonannya yang pada pokoknya menyampaikan karena Permohonan yang diajukan oleh PT. SINAR MOROKARTA PERKASA sebagaimana disebutkan di atas telah didiamkan atau tidak ditindaklanjuti atau tidak ditanggapi oleh BUPATI MOROWALI, maka kemudian PT. SINAR MOROKARTA PERKASA melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 25 Januari 2021;

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh alat bukti yang diajukan Para Pihak, maka Majelis Hakim berkeyakinan tidak diperoleh satupun fakta hukum yang menunjukkan jika BUPATI MOROWALI telah atau pernah menindaklanjuti atau setidaknya menanggapi Permohonan penyerahan dokumen perizinan pertambangan milik PT. SINAR MOROKARTA PERKASA, dari Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat, Permohonan penyerahan dokumen perizinan pertambangan dari Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, yang diajukan oleh PT. SINAR MOROKARTA PERKASA selaku Pemohon dalam perkara *a quo*, secara yuridis telah didiamkan atau tidak ditindaklanjuti atau tidak ditanggapi oleh BUPATI MOROWALI, sehingga Objek Permohonan dalam perkara Nomor: 6/P/FP/2021/PTUN.PL memenuhi unsur dan maksud ketentuan Pasal 53 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 *juncto* Pasal 1 Angka 1 dan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum terkait dengan kewenangan relatif Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Objek Permohonan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 Ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, berbunyi sebagai berikut:

(3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.

(4) Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, maka yang dimaksud dengan Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 6 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Palangkaraya, Palu, Kendari, Yogyakarta, Mataram, Dan Dili, maka dibentuklah Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang berkedudukan di Palu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (6) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1997 tersebut, maka daerah atau wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palu meliputi seluruh Wilayah Kabupaten dan Kotamadya Daerah Tingkat II yang terdapat dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa Kabupaten Morowali merupakan salah satu kabupaten yang secara administratif masih berada dalam wilayah hukum Provinsi Sulawesi Tengah dan berdasarkan nalar yang sehat, hal tersebut merupakan keadaan atau fakta hukum yang telah diketahui oleh umum sehingga tidak perlu dibuktikan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 100 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat BUPATI MOROWALI merupakan Pejabat Pemerintahan yang berkedudukan dalam wilayah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dan dalam menjalankan tugas

Halaman 27 dari 43 Halaman Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta fungsinya, BUPATI MOROWALI telah mendiamkan atau tidak menindaklanjuti atau tidak menanggapi permohonan penyerahan dokumen perizinan yang diajukan oleh PT. SINAR MOROKARTA PERKASA, sehingga pengajuan Permohonan untuk memperoleh putusan atas penerimaan Permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan Pejabat Pemerintahan yang diajukan oleh PT. SINAR MOROKARTA PERKASA ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, secara yuridis telah tepat;

Menimbang, bahwa kemudian mencermati fakta mengenai Permohonan perkara a quo teregistrasi di bagian Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 25 Januari 2021, yang mana hal tersebut dilakukan setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada tanggal 2 November 2020, maka atas fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sifat pengujian Permohonan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu adalah *ex tunc*, yang berarti bahwa pemeriksaan atas sengketa a quo diperiksa berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara melakukan tindakan dan/atau mengeluarkan keputusan, sehingga untuk menentukan peraturan perundang-undangan mana yang akan digunakan dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa dalam perkara a quo, khususnya berkaitan dengan aspek kewenangan Pengadilan, Majelis Hakim berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan digunakan oleh Pemohon pada saat mengajukan permohonan kepada Badan Pejabat Tata Usaha Negara dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berlaku pada saat Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti P-1 maupun P-2 diperoleh fakta bahwa Objek Permohonan diterima oleh Termohon pada tanggal 28 Oktober 2020, dengan demikian terhadap surat Permohonan tersebut (*vide* Bukti P-1 dan Bukti P-2) diterima Termohon sebelum diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sehingga pengujian Permohonan perkara a quo didasarkan pada ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum mengenai kewenangan absolut dan kewenangan relatif Pengadilan Tata

Halaman 28 dari 43 Halaman Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2021/PTUN.PL



Usaha Negara tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palu secara yuridis berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara Permohonan *a quo*;

2. Pertimbangan Mengenai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguji kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon berkaitan Permohonan yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, *in casu* perkara Nomor: 6/P/FP/2021/PTUN.PL, maka dapat diukur dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, berbunyi sebagai berikut:

“Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan keputusan dan/atau tindakan.”

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, berbunyi sebagai berikut:

(3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.

(4) Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Menimbang, bahwa setelah mencermati konstruksi norma pada ketentuan Pasal 1 Angka 15 *juncto* Pasal 53 Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, maka berkaitan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dapat diuji dengan parameter sebagai berikut:

1. Pemohon merupakan seseorang atau badan hukum perdata;
2. Pemohon telah mengajukan Permohonan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan untuk penerbitan sebuah keputusan dan/atau dilakukannya suatu tindakan;
3. Pemohon yang mengajukan Permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara haruslah Pemohon yang telah mengajukan Permohonan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan untuk penerbitan sebuah keputusan dan/atau dilakukannya suatu tindakan, namun Permohonan tersebut tidak ditindaklanjuti dengan sebuah keputusan dan/atau tindakan;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat Permohonan, surat Tanggapan, dan alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak, yaitu Bukti P-1, Bukti P-2, Bukti P-6, Bukti P-7, Bukti T-1, Bukti T-3, maka terdapat fakta hukum yang menunjukkan sebagai berikut:

- Pertama : bahwa PT. SINAR MOROKARTA PERKASA, selaku Pemohon dalam perkara *a quo* merupakan sebuah badan hukum perdata berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. SINAR MOROKARTA PERKASA" Nomor:24 tanggal 14 Januari 2008 yang dibuat oleh dan/atau dihadapan ETHA MALIPUNGI, S.H., Notaris di Kabupaten Donggala, dan kepentingan hukum Perseroan dalam pemeriksaan perkara *a quo* diwakili oleh SYARIFUDIN, yang menjabat sebagai Direktur dari PT. SINAR MOROKARTA PERKASA;
- Kedua : bahwa PT. SINAR MOROKARTA PERKASA dalam melaksanakan kegiatan pertambangan di Desa Bahomotefe, Kecamatan Bungku Tengah, telah memperoleh Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi melalui Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.005/DESDM/II/2012, tanggal 16 Januari 2012;
- Ketiga : bahwa berdasarkan dalil Termohon dalam surat tanggapan diperoleh fakta mengenai dokumen perizinan pelaksanaan kegiatan pertambangan PT. SINAR MOROKARTA PERKASA di Desa Bahomotefe Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali, belum diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (*vide* Bukti T-1);
- Keempat : bahwa PT. SINAR MOROKARTA PERKASA melalui Direktornya telah mengajukan Surat Nomor: 037/DIR/SMP/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020, yang mana surat tersebut diterima oleh pegawai dari instansi Termohon pada tanggal 28 Oktober 2020, dan pada pokoknya berisi Permohonan penyerahan dokumen perizinan pertambangan milik PT. SINAR MOROKARTA PERKASA yang ada pada Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;



Menimbang, bahwa setelah mencermati alat bukti surat yang diajukan Para Pihak dalam persidangan, maka tidak diperoleh satupun fakta hukum yang menunjukkan jika BUPATI MOROWALI telah menindaklanjuti Permohonan penyerahan dokumen perizinan atas pelaksanaan kegiatan pertambangan yang diajukan PT. SINAR MOROKARTA PERKASA dengan sebuah keputusan dan/atau tindakan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati berkas perkara Permohonan *a quo*, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa PT. SINAR MOROKARTA PERKASA telah mengajukan Permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 25 Januari 2021 berkaitan dengan sikap diam BUPATI MOROWALI tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan terkait dengan tenggang waktu pengajuan Permohonan maupun tenggang waktu pengajuan pengujiannya di Pengadilan Tata Usaha Negara, karena penghitungan tenggang waktu tersebut haruslah juga dimaknai sebagai rangkaian kedudukan hukum Pemohon dalam mengajukan Permohonannya di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak diaturnya standar pelayanan terhadap waktu tertentu agar Termohon menindaklanjuti surat dari Pemohon, maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, menurut Majelis Hakim penghitungan tenggang waktu atas surat Permohonan tersebut dihitung selama 10 (sepuluh) hari kerja setelah Termohon menerima secara lengkap Permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa kemudian ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017, mengatur sebagai berikut:

"Tenggang waktu pengajuan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan, hanya dapat diajukan 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak:

- a. batas waktu kewajiban badan atau pejabat pemerintahan untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terlampau; atau*
- b. setelah 10 (sepuluh) hari kerja permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, jika batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan".*



Menimbang, bahwa surat Pemohon kepada Termohon (*vide* bukti P-1 dan Bukti P-2) diterima secara resmi oleh pegawai dari instansi Pemerintah Kabupaten Morowali pada tanggal 28 Oktober 2020, hal mana atas dalil yang disampaikan Pemohon dan alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak dibantah kebenarannya oleh Termohon, kemudian setelah 10 (sepuluh) hari kerja Termohon menerima secara lengkap Permohonan *a quo*, Termohon terbukti tidak menetapkan keputusan dan/atau tidak melakukan tindakan sesuai surat Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Majelis Hakim berpendapat bahwa setidak-tidaknya setelah 10 (sepuluh) hari kerja permohonan (*vide* Bukti P-1 dan P-2) diterima secara lengkap oleh Termohon, maka Pemohon dapat mengajukan Permohonan untuk mendapatkan putusan atas penerimaan Permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan, hingga akhirnya Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu menerima pendaftaran Permohonan perkara *a quo* pada tanggal 25 Januari 2021 secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan (*e-court*), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa secara hukum Pemohon sudah tepat dalam segi waktu pada saat mengajukan Permohonan untuk mendapatkan putusan atas penerimaan Permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, karena diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 Huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa PT. SINAR MOROKARTA PERKASA, merupakan sebuah badan hukum perdata berbentuk perseroan terbatas yang telah atau pernah mengajukan Permohonan penyerahan dokumen perizinan atas pelaksanaan kegiatan pertambangan di Desa Bahomotefe, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali kepada BUPATI MOROWALI, namun Permohonan tersebut tidak pernah ditindaklanjuti oleh BUPATI MOROWALI dengan sebuah keputusan dan/atau suatu tindakan. Lebih lanjut, Majelis Hakim juga menilai bahwa Pemohon telah tepat dari segi waktu dalam mengajukan Permohonan untuk mendapatkan putusan atas penerimaan Permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, sehingga secara



yuridis Pemohon harus dipandang memiliki kepentingan dan kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan dalam perkara *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu;

3. Pertimbangan Mengenai Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017, maka terdapat 3 (tiga) aspek yang harus diuji berkaitan dengan pokok Permohonan *a quo*, yaitu aspek wewenang, aspek prosedur, dan aspek substansi;

Menimbang, bahwa apakah BUPATI MOROWALI selaku Termohon dalam perkara Permohonan *a quo*, memiliki wewenang untuk menerbitkan keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dimohonkan? Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kaidah dasar hukum administrasi menghendaki bahwa apabila Pejabat Pemerintahan akan melakukan suatu tindakan hukum, maka Pejabat Pemerintahan harus terlebih dahulu memiliki wewenang yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Pejabat Pemerintahan memiliki wewenang atau tidak untuk melakukan suatu tindakan hukum, maka dapat dilihat dari tiga parameter alat uji wewenang yang meliputi:

1. Wewenang yang berkaitan dengan masa atau tenggang waktu dari berlakunya wewenang (*Bevoegheid ratione temporis*);
2. Wewenang yang berkaitan dengan wilayah atau daerah berlakunya wewenang (*Bevoegheid ratione loci*);
3. Wewenang yang berkaitan dengan cakupan bidang atau materi wewenang (*Bevoegheid ratione materiae*);

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan wewenang yang berkaitan dengan masa atau tenggang waktu dari berlakunya wewenang (*Bevoegheid ratione temporis*), Majelis Hakim berpendapat bahwa nama Drs. Taslim, sebagaimana tercantum namanya dalam Surat Kuasa Khusus Termohon dan sebagai subjek hukum orang yang dituju langsung dalam surat Permohonan dari Pemohon (*vide* Bukti P-1), adalah bertindak secara hukum dalam kapasitas sebagai Pejabat Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali yaitu sebagai Bupati Morowali, sehingga Termohon memiliki wewenang dari segi masa atau tenggang waktu;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan wewenang yang berkaitan dengan wilayah atau daerah berlakunya wewenang (*Bevoegheid ratione*



loci), Majelis Hakim berpendapat bahwa lokasi izin usaha pertambangan Operasi Produksi PT. SINAR MOROKARTA PERKASA (*in casu* Pemohon) terletak di Bahomotefe, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, sehingga lokasi izin usaha pertambangan operasi produksi PT. SINAR MOROKARTA PERKASA tersebut termasuk dalam wilayah hukum Kabupaten Morowali, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Termohon memiliki wewenang dari segi daerah/wilayah hukum untuk menerbitkan keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dimohonkan oleh pihak PT. SINAR MOROKARTA PERKASA;

Menimbang, bahwa kemudian secara normatif, ketentuan yang mengatur tentang wewenang Termohon berkaitan dengan cakupan bidang atau materi wewenang (*Bevoegheid ratione materiae*) diatur dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, berbunyi sebagai berikut:

“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.”

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014), berbunyi sebagai berikut:

“Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.”

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 37 Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009) menyatakan bahwa: *“IUP diberikan oleh Bupati/Walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota.”*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, berbunyi sebagai berikut:

“Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi.”

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, berbunyi sebagai berikut:



“Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.”

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (selanjutnya disebut Peraturan Menteri ESDM Nomor 43 Tahun 2015), mengatur sebagai berikut:

“Bupati/walikota wajib menyampaikan dokumen perizinan di bidang Mineral dan Batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan WIUP-nya dalam 1 (satu) wilayah provinsi beserta kelengkapannya kepada gubernur sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017, berbunyi sebagai berikut:

“Termohon adalah Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang mempunyai kewajiban untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam permohonan dari pemohon”;

Menimbang, bahwa secara konsepsional wewenang merupakan kumpulan hak dan kewajiban. Dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri dan mengelola sendiri, sedangkan kewajiban memiliki pengertian kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya dan menjalankan pemerintahan dalam tertib ikatan negara secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dengan menggunakan penafsiran sistematis terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka konstruksi wewenang menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang semula merupakan kewenangan atributif seorang bupati atau walikota selaku Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota, telah beralih kepada gubernur selaku Kepala Daerah Tingkat Provinsi;

Menimbang, bahwa konstruksi peralihan kewenangan dari Bupati/Walikota selaku Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota kepada Gubernur selaku Kepala Daerah Tingkat Provinsi tersebut di atas, juga diikuti kewajiban penyerahan dan penerimaan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara dari bupati/walikota kepada gubernur, sehingga



bupati/walikota memiliki kewajiban untuk menyerahkan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara, beserta kelengkapannya kepada gubernur dalam rangka peralihan kewenangan penerbitan IUP;

Menimbang, bahwa setelah mencermati alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak, yaitu Bukti P-6 dan Bukti T-3 maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa PT. SINAR MOROKARTA PERKASA dalam melaksanakan kegiatan pertambangan di Desa Bahomotefe, Kecamatan Bungku Tengah, telah memperoleh Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi melalui Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.005/DESDM/II/2012, tanggal 16 Januari 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari segi cakupan bidang atau materi wewenang (*bevoegheid ratione materiae*), Termohon sebagai Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menerbitkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. SINAR MOROKARTA PERKASA melalui Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.005/DESDM/II/2012, tanggal 16 Januari 2012, secara yuridis memiliki wewenang dan/atau kewajiban untuk menyerahkan dokumen perizinan pertambangan atas nama PT. SINAR MOROKARTA PERKASA kepada GUBERNUR SULAWESI TENGAH sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 14 Ayat (1) dan Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, serta ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri ESDM Nomor 43 Tahun 2015 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan baik dari segi masa/tenggang waktu, segi tempat/wilayah hukum maupun dari segi cakupan bidang/materi, Termohon *in casu* BUPATI MOROWALI memiliki wewenang dalam menerbitkan keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dimohonkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap aspek prosedur Permohonan yang diajukan oleh PT. SINAR MOROKARTA PERKASA guna memperoleh sebuah keputusan dan/atau tindakan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 43 Tahun 2015, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan, maka tidak diperoleh ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai prosedur/tahapan



penyerahan dokumen perizinan di bidang Mineral dan Batubara dari Bupati/Walikota kepada Gubernur;

Menimbang, bahwa jika mencermati lebih seksama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 43 Tahun 2015 tersebut, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan, maka tidak ditemukan kewajiban Pemegang IUP, dalam hal ini PT. SINAR MOROKARTA PERKASA untuk mengajukan Permohonan tertulis lebih dahulu kepada BUPATI MOROWALI agar dokumen perizinan pertambangan milik PT. SINAR MOROKARTA PERKASA diserahkan kepada GUBERNUR SULAWESI TENGAH. Sehingga dengan adanya Permohonan (*vide* Bukti P-1) yang diajukan oleh PT. SINAR MOROKARTA PERKASA kepada BUPATI MOROWALI, harus dipandang sebagai langkah hukum yang konstruktif-positif guna mengingatkan BUPATI MOROWALI agar kekuasaan dan/atau kewajiban untuk menyelenggarakan pemerintahan dijalankan sebagaimana mestinya dalam tertib ikatan pemerintahan secara keseluruhan, termasuk dan tidak terbatas kekuasaan atau kewajiban untuk menyerahkan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara sebagai konsekuensi adanya peralihan wewenang penerbitan izin usaha pertambangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan berkaitan dengan substansi Permohonan *a quo* dengan isu hukum: Apakah sikap diam BUPATI MOROWALI berkaitan dengan Permohonan penyerahan dokumen perizinan di bidang pertambangan yang diajukan oleh PT. SINAR MOROKARTA PERKASA telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik?

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, berbunyi sebagai berikut:

“Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi.”

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri ESDM Nomor 43 Tahun 2015, berbunyi sebagai berikut:

“Bupati/walikota wajib menyampaikan dokumen perizinan di bidang Mineral dan Batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan WIUP-nya dalam 1 (satu) wilayah provinsi beserta kelengkapannya kepada gubernur sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, berbunyi sebagai berikut:

“Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.”

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat Permohonan dan alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan PT. SINAR MOROKARTA PERKASA merupakan sebuah badan hukum perdata yang pada awalnya memperoleh Persetujuan Pencadangan Wilayah untuk Lokasi Kuasa Pertambangan pada tanggal 26 Agustus 2008, dan memperoleh Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi pada tanggal 23 Februari 2010, kemudian memperoleh Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi di Desa Bahomotefe Kecamatan Bungku Tengah, sejak tanggal 16 Januari 2012 dari BUPATI MOROWALI (*vide* bukti P-5, bukti P-6, bukti T-2, dan bukti T-3, bukti T-4);

Menimbang, bahwa lebih lanjut dengan mencermati Bukti P-11, Bukti P-12, Bukti P-13, dan Bukti P-14, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa selain dokumen perizinan berupa Surat Keputusan Pencadangan Wilayah, Dokumen IUP Eksplorasi dan Dokumen IUP Operasi Produksi, terdapat juga dokumen pendukung perizinan lainnya berupa dokumen lingkungan, seperti: KA-ANDAL (Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan) Rencana Kegiatan Pertambangan Biji Nikel di Desa Bahomotefe Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana tertuang dalam Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Morowali Nomor: 660.1/317/KLH/V/2010 tanggal 17 Mei 2010, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Kegiatan Penambangan Biji Nikel di Desa Bahomotefe Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana tertuang dalam Lembar Persetujuan dari Kepala Kantor Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Morowali Nomor: 660.1/359/KLH/VIII/2010 tanggal 18 Agustus 2010, Keputusan Bupati Morowali Nomor: 660.1/360/KLH/VIII/2010 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Penambangan Biji Nikel di Desa Bahomotefe Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah Oleh PT. SINAR MOROKARTA PERKASA tanggal 18 Agustus 2010, serta Lembar

Halaman 38 dari 43 Halaman Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persetujuan Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Morowali Nomor: 540/177.2/DESDM/I/2011 tanggal 14 Januari 2011 atas Dokumen Studi Kelayakan Penambangan Nikel PT. SINAR MOROKARTA PERKASA;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap dalil Termohon dalam surat tanggapan yang pada pokoknya menyatakan bahwa salah satu alasan tidak diserahkannya dokumen Izin Usaha Pertambangan milik Pemohon kepada Gubernur Sulawesi Tengah dikarenakan Termohon telah menerbitkan keputusan mengenai pencabutan IUP Eksplorasi Pemohon pada tanggal 10 Maret 2014 (*vide* bukti T-6), maka Majelis Hakim menilai bahwa dalil Termohon tersebut tidak beralasan secara hukum, karena permohonan pelimpahan yang diajukan oleh Pemohon (*vide* bukti P-1) adalah terhadap dokumen perizinan pertambangan IUP Operasi Produksi atas nama PT. SINAR MOROKARTA PERKASA, yang terletak di Desa Bahomotefe Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali dengan luas 468 hektar, terlebih Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan hukum yang dilakukan Termohon sebagaimana termuat pada bukti T-6 tersebut menjadi tidak relevan lagi karena terhitung sejak tanggal 16 Januari 2012, Pemohon telah memperoleh peningkatan dari IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi (*vide* Bukti P-6 dan Bukti T-3);

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mencermati fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sampai batas yang ditentukan, yakni selama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diundangkan, BUPATI MOROWALI tidak menyerahkan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral PT. SINAR MOROKARTA PERKASA kepada GUBERNUR SULAWESI TENGAH, sedangkan hal tersebut merupakan kewajiban yang secara limitatif telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, dalam hal ini ketentuan Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, terlebih sikap diam Termohon tersebut semestinya tidak dapat menjadi beban yang merugikan hak Pemohon sebagai pencari keadilan. Pemohon sebagai pihak yang memperoleh suatu Keputusan Tata Negara berupa IUP Operasi Produksi dengan cara yang sah dan itikad baik, maka semestinya Pemohon tersebut harus dilindungi dan haknya tidak boleh dikurangi ketika terdapat kesalahan administrasi yang dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap diam BUPATI MOROWALI yang tidak menyerahkan dokumen perizinan di bidang

Halaman 39 dari 43 Halaman Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertambangan mineral milik PT. SINAR MOROKARTA PERKASA kepada GUBERNUR SULAWESI TENGAH merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini ketentuan Pasal 14 Ayat (1) dan Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *juncto* ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri ESDM Nomor 43 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji sikap diam BUPATI MOROWALI yang tidak menyerahkan dokumen perizinan dibidang pertambangan milik Pemohon kepada GUBERNUR SULAWESI TENGAH dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya Asas Kepastian Hukum;

Menimbang, bahwa secara konseptual, Asas Kepastian Hukum merupakan asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pertimbangan hukum pada aspek substansi Permohonan, maka telah terbukti bahwa sikap diam BUPATI MOROWALI selaku TERMOHON dalam perkara *a quo* yang tidak menyerahkan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral milik PT. SINAR MOROKARTA PERKASA kepada GUBERNUR SULAWESI TENGAH menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Pemohon karena sikap diap Termohon tersebut merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini ketentuan Pasal 14 Ayat (1) dan Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *juncto* ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri ESDM Nomor 43 Tahun 2015. Lebih lanjut, Majelis Hakim menilai bahwa sikap diam Termohon atas Permohonan yang diajukan terbukti telah merugikan kepentingan Pemohon karena Pemohon telah melakukan penanaman modal/investasi untuk melaksanakan kegiatan pertambangan di wilayah yang ditetapkan, serta terungkap fakta bahwa dokumen perizinan pertambangan milik PT. SINAR MOROKARTA PERKASA, khususnya terhadap Surat Keputusan Bupati Morowali 540.3/SK.005/DESDM/II/2012 tanggal 16 Januari 2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. SINAR MOROKARTA PERKASA, masih berlaku sampai dengan tanggal 16 Januari 2032, dan tidak pernah dicabut atau tidak pernah dibatalkan penerbitannya oleh Bupati Morowali/Pengadilan, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa sikap diam BUPATI



MOROWALI selaku Termohon dalam perkara *a quo* telah nyata bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena sikap diam BUPATI MOROWALI selaku TERMOHON dalam perkara *a quo* yang tidak menyerahkan dokumen perizinan di bidang pertambangan milik PT. SINAR MOROKARTA PERKASA kepada GUBERNUR SULAWESI TENGAH telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni Asas Kepastian Hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Permohonan Permohon dalam perkara *a quo* beralasan menurut hukum;

4. Kesimpulan

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan dan fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan:

4.1. Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Permohonan dalam Perkara Nomor: 6/P/FP/2021/PTUN.PL;

4.2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan dalam Perkara Nomor: 6/P/FP/2021/PTUN.PL;

4.3. Pokok Permohonan dalam Perkara Nomor: 6/P/FP/2021/PTUN.PL beralasan menurut hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 *juncto* Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Termohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul selama pemeriksaan sengketa ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas yang terbatas, sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim

Halaman 41 dari 43 Halaman Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2021/PTUN.PL



mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap seluruh alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak untuk memutus dan menyelesaikan sengketa ini;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mewajibkan kepada Termohon (Bupati Morowali) untuk menyerahkan Surat Keputusan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Gubernur Sulawesi Tengah) dalam bentuk Berita Acara Penyerahan Dokumen Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, berupa: Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.005/DESDM/II/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Sinar Morokarta Perkasa tanggal 16 Januari 2012, dengan luas 468 Hektar, yang terletak di Desa Bahomotefe, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, beserta dokumen pendukung lainnya;
3. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 330.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021, oleh Kami, HARYATI, S.H., M.H., Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu sebagai Hakim Ketua Majelis, RICHARD TULUS, S.H., dan ANISSA YANUARTANTI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui persidangan secara elektronik oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh JEMY JOIEH HATTU, S.H., sebagai Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

METERAI/TTD

RICHARD TULUS, S.H.

HARYATI, S.H., M.H.

TTD

ANISSA YANUARTANTI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

JEMY JOIEH HATTU, S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor: 6/P/FP/2021/PTUN.PL

1. Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.	150.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	100.000,-
4. Biaya Surat Kuasa Hukum Pemohon	Rp.	10.000,-
5. Biaya Panggilan Pertama (PNBP)	Rp.	20.000,-
6. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
7. Biaya Meterai	Rp.	10.000,-
JUMLAH	Rp.	330.000,-

(Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 43 dari 43 Halaman Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2021/PTUN.PL